BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (Supriadi & Alimuddin, 2011, hal. 417). Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, Indonesia memiliki potensi yang melimpah akan kekayaan lautnya. Dimana potensi perikanan bidang penangkapan sebesar 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah. Banyak masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing. Asia Tenggara sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat banyak negara berkembang, di mana negara berkembang tersebut dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber tenaga kerja perikanan terbesar di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. Banyaknya tenaga kerja tersebut membuat banyak perusahaan perikanan merekrut mereka untuk bekerja sebagai anak buah kapal. Menurut *International Labour Organization* industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia.

Anak buah kapal yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. Mereka sangat rentan untuk dieksploitasi, dan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),

dan kekerasan seksual. Dibeberapa industri perikanan Asia termasuk Indonesia, para anak buah kapal banyak yang mengalami kesulitan, dikarenakan upah yang rendah, diskriminasi gender, pelanggaran di tempat kerja, pemotongan gaji, serta keterlibatan buruh anak dan kerja paksa.

Indonesia adalah negara penyumbang pekerja maritim terbesar ketiga di dunia, setelah China dan Filipina dengan jumlah awak kapal 1,2 juta orang yang saat ini bekerja pada kapal berbendera asing. Menurut UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, awak kapal juga merupakan pekerja migran. Bahkan perlindungan hukum bagi awak kapal dapat ditemukan dalam aturan hukum internasional yang secara umum dan secara khusus membahas tentang awak kapal. (Yudhi Dharmawan, 2022)

Salah satu kasus eksploitasi ABK WNI di kapal asing adalah kasus eksploitasi ABK Indonesia pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau. Penyiksaan yang dialami tersebut berakibat pada meninggalnya Hasan Afriadi (20 Tahun) yang bekerja sebagai ABK dan berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Pengembangan tindak pidana selanjutnya menetapkan Supervisor kapal Lu Huang Yuan Yu yang berinisial S yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (China) sebagai tersangka. Sebelum menjadi ABK, Hasan mendapatkan pekerjaan tersebut dari penyalur tenaga kerja Indonesia atas nama PT. MTB di Kota Tegal. Menurut *Destructive Fishing Watch (DFW)*, PT. MTB tidak memiliki SIUPPAK dari Kementerian Perhubungan dan SP3MI dari Kementerian Tenaga Kerja.

Tuntutan selanjutnya dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana ini dikarenakan diduga adanya pelanggaran tindak pidana perdagangan Orang yang menimbulkan korban jiwa.

Terhadap kasus ini sendiri telah terdapat 3 putusan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat perbuatan hukum pada kasus tersebut, seperti:

- a. Putusan PN BATAM Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm Tanggal 12 Januari 2021.

Putusan ini hadir dikarenakan adanya dakwaan dari Kejaksaan Negeri Batam atas perbuatan penganiyaan yang didakwakan kepada SONG CHUANYUN Als SONG. Amar putusan ini adalah Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah didalam persidangan.

- b. Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili sesuai yuridiksi hukumnya atas perbuatan hukum perdagangan orang yang didakwakan kepada 2 terdakwa yaitu T.A (inisial), dan T.S (inisial). Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- c. Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini memutuskan bahwa terdakwa atas nama L.K (inisial) als E (inisial) dinyatakan secara sah bersalah atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan perdagangan orang adalah tindak pidana yang mencakup aktifitas perekrutan hingga penerimaan seseorang baik dengan kekerasan, penipuan, pemalsuan sehingga mendapatkan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain dengan maksud mengeksploitasi orang lain tersebut baik dilakukan didalam negeri maupun antar negara.

Pada tahun 2019 terjadi sebuah dugaan eskploitasi awak kapal Indonesia di kapal penangkap ikan Long Xing 629 milik perusahaan China. Awak kapal asal Indonesiabekerja selama 18 jam dalam waktu 24 jam, bahkan mereka diberikan makanan dan minuman yang sudah tidak layak konsumsi, upah yang diterima tidak sesuai, sertamereka mendapatkan perlakuan diskriminasi antara awak kapal asal Indonesia dengan asal China (Piseth, 2020, hal. 161). Dan masih banyak kasus lainnya.

Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar pemenuhan hak awak kapal dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. Pada kasus tersebut awak kapal asal Indonesia tidak mendapat jam istirahat ataupun perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya. Padahal dalam konvensi ILO No.188

tahun 2007 telah jelas mengatur bahwa negara anggota harus memberikan hak bagi awak kapal yang sudah menjadi haknya. Dalam konvensi tersebut juga menjelaskan hak-hak para awak kapal untuk dapat diberi waktu istirahat yang cukup supaya dapat menjaga kesehatan mereka

Perlindungan hukum terhadap ABK ini menjadi tanggung jawab negara tempat ABK bekerja, dan negara pelabuhan. Aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan para ABK dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam konsideran juga disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, dan pelanggaran serta kejahatan lainnya. Sayangnya dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas perlindungan yang akan diberikan negara terhadap para ABK, karena dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang TKI yang bekerja di luar negeri secara umum, padahal perlu ada pengaturan secara khusus mengenai tenaga kerja ABK ini. Sedangkan, dalam kerangka hukum internasional permasalahan mengenai ABK ini diatur lebih lanjut dalam Konvensi *International Labour Organisation (ILO)* No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang mana dalam konvensi ini memberikan kelayakan kerja diatas kapal bagi para Anak Buah Kapal (ABK).

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, terdapat >200.000 ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing selama tahun 2013-2015 dengan penempatan tertinggi di Taiwan (217.655 orang) dan Korea Selatan (31.792 orang). Sementara

itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jumlah imigran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri selama 2015-2019 sebanyak 30.864 orang. Mayoritas ABK tersebut di atas berasal dari Jawa Tengah (4.359 orang) dan Jawa Barat (3.145 orang) atau sejumlah 90% dari keseluruhan ABK yang ditempatkan selama tahun 2017-2019.

Kesulitan mencari pekerjaan dan rendahnya upah di Indonesia menjadi faktor pendorong ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing. Hasil tangkapan dan pendapatan sebagai nelayan di Indonesia yang tidak menentu menjadi alasan pendorong mereka bekerja di luar negeri karena pendapatannya dianggap lebih pasti. Sementara itu, faktor yang membuat ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing karena upah yang ditawarkan lebih besar apabila dibandingkan dengan penghasilan yang didapat pada pekerjaan sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2019 rata-rata nilai upah sebagai buruh di Indonesia hanya Rp2,5juta, sementara upah pokok yang ditawarkan di kapal ikan Taiwan adalah NT23.800 atau sekitar Rp11,9juta.

Meski perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing tidak mudah, terutama pada pengawasan negara pada saat bekerja di atas kapal sulit dilakukan karena lokasinya yang berada di tengah laut. Tetapi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia menurut konstitusi untuk memberikan perlindungan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak buah kapal Indonesia sangat rentan dengan berbagai masalah yang belum diatur oleh regulasi yang efektif untuk permasalahan tersebut. Misalnya praktik pelanggaran ketenagakerjaan, kerja paksa (*forced labour*), penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang (*human*

trafficking). Bahkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dapat meningkat secara pesat dikarenakan tidak adanya regulasi yang memberikan kepastian terhadap perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja menjadi anak buah kapal di atas kapal negara asing.

Bank Dunia (*World Bank*) memproyeksikan pasokan ikan dunia akan meningkat menjadi 187 juta ton pada tahun 2030, dimana 50% produksi ikan berasal dari kegiatan penangkapan ikan. Peningkatan penduduk dan pasokan ikan dunia akan terus meningkatkan sesuai permintaan pekerja pada kapal ikan karena pertumbuhan industri penangkapan ikan yang semakin tinggi.

Pada tingkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap, yaitu sebesar 6,71 juta ton pada tahun 2018. Peringkat pertama ditempati oleh China dan peringkat ke-2 ditempati oleh Peru dengan kemampuan produksi masing-masing sebesar 12,68 juta ton dan 7,15 juta ton pada tahun yang sama. Selain itu peran Indonesia yang besar dalam produksi perikanan global, Indonesia juga aktif mengirimkan ABK untuk bekerja di luar negeri pada kapal ikan negara asing.

Peranan, dengan kata lain "*role*" adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur dan keterlibatan langsung seseorang dalam menentukan sikap berpartisipasi untuk memajukan sesuatu. Jika dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contoh seseorang dapat berperan untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan masyarakat, contoh yang berkaitan dengan

kegiatan illegal fishing misalnya para nelayan dan masyarakat ikut berperan dalam mengawasi gerak gerik yang mencurigakan bagi pelaku pencurian ikan di perairan.

Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan illegal fishing menjelaskan bahwa hukum internasional diartikan sebagai himpunan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Apalagi jika dilihat dalam istilah hukum internasional, salah satunya menyatakan bahwa istilah hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah selain yang mengatur hukum antar negara juga mengatur antara negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara dan antara subjek hukum negara satu sama lainnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disamping hukum internasional yang berlaku umum (*general*) terdapat pula hukum internasional yang berlaku secara regional yang terbatas lingkungan berlakunya seperti apa yang lazim dinamakan hukum internasional Amerika atau hukum internasional Amerika latin. Adanya berbagai lembaga hukum internasional regional disebabkan oleh keadaan yang khusus terdapat dibagian dunia itu, maka hukum internasional regional tidak boleh menyimpang dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku secara umum, bahkan adakalanya suatu konsep hukum yang mula-mula timbul dan tumbuh sebagai suatu konsep atau lembaga hukum internasional regional, kemudian diterima sebagai bagian dari hukum internasional umum. Sebagai contoh konsep landas kontinen (*continental shelf*) dan konsep perlindungan

kekayaan hayati laut (yang mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Amerika).
(Halimatul Marwani, 2019)

Kondisi lainnya yakni, peningkatan jumlah penduduk dunia yang terus mendorong permintaan produk perikanan sebagai salah satu sumber makanan. Populasi penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Mencermati peristiwa diatas, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut untuk memahami bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum internasional terutama kepada anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan China. Serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap dugaan praktik kerja paksa terhadap sejumlah anak buah kapal di kapal penangkap ikan. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL INDONESIA PADA KAPAL PERIKANAN CHINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis menarik beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana upaya dan proses perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan ikan milik perusahaan China?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan china dalam perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui proses dan hambatan perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China.

C. KEGUNAAN PENELITIAN**Kegunaan penelitian sebagai berikut:****1. Kegunaan Teoritis:**

- a. Bagi Keilmuan, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Internasional secara khusus
- b. Referensi ini diharapkan dapat meluaskan wawasan serta pengetahuan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Anak Buah Kapal yang mengalami permasalahan hukum yang bekerja di luar negeri di atas kapal kapal asing menurut Hukum Internasional.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan literatur dalam penelitian sejenis dan/atau penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan perbandingan aturan nasional dan internasional terhadap perlindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia, diharapkan pula terhadap masyarakat agar mampu mengetahui terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing atau ditempatkan di luar negeri.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Indonesia dapat segera membuat regulasi yang mempunyai kapasitas hukum tetap tentang pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) Indonesia yang haknya dirampas, agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila yang melekatkan harkat kemanusiaan serta keadilan tercantum dalam sila kedua, yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua sila tersebut bermakna bahwa Pancasila menitikberatkan pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini Indonesia mencerminkan bahwa Pancasila menjadi salah satu pedoman untuk pembentukan aturan-aturan hukum di Indonesia. Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat : “Salah satu pemahaman Pancasila berkonteks historis adalah salah satu bentuk untuk memperluas ide-ide sebagaimana adanya

pengarahan dengan apa yang dilakukannya untuk dimasa yang akan mendatang.” (Otje & Susanto, 2007, hal. 161).

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori kepastian hukum, kepastian merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan perilaku seseorang. Kepastian merupakan bentuk tercapainya tujuan dari hukum yang dapat dilaksanakan.

Kelsen mengutarakan pendapatnya tentang pengertian dari hukum, yakni bahwa hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dan memuat beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah aturan dasar atau pedoman yang mengikat masyarakat. Hukum umum mencakup aturan-aturan yang mengarahkan perilaku individu. Aturan-aturan tersebut merupakan pembatasan sosial terhadap individu atau perilaku. Adanya peraturan tersebut dan pelaksanaan peraturan tersebut telah memberikan kepastian hukum (Marzuki, 2008, hal. 158).

Utrecht menyatakan kepastian hukum. Dalam pandangannya, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, ada aturan umum yang membuat individu tahu tindakan apa yang bisa atau tidak bisa diambil. Kedua, memberikan kesewenang-wenangan pemerintah karena aturan. Secara umum, individu dapat mengetahui tuduhan atau tindakan yang mungkin dilakukan negara terhadap individu (Syahrani, 1999, hal. 23).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum terdiri dari tiga nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) ataupun *doelmatigheid* ataupun keuntungan. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sehingga perlu diperhatikan. Keamanan dan ketertiban nasional dapat tercapai jika kepastian hukum harus dijaga dan hukum positif harus ditaati setiap saat. Nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan adalah nilai-nilai yang ingin kita capai berdasarkan teori kepastian hukum ini (Rato, 2010, hal. 95).

Dari teori kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa perwujudan pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dapat diberikan dengan adanya pedoman atau aturan mengenai sikap setiap orang. Dengan demikian, anak buah kapal yang bekerja di atas kapal asing mendapat kepastian hukum.

b. Teori Yurisdiksi

Asal kata Bahasa Indonesia “yurisdiksi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*jurisdiction*”. Sedangkan istilah *jurisdiction* dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “*yuris*” dan “*dictio*”. Secara garis besar, I Wayan Parthiana menyimpulkan bahwa yurisdiksi mengacu pada kepemilikan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan dapat juga diartikan sebagai “kekuasaan atau kewenangan

hukum” dengan kata lain didalamnya tercakup; hak-hak yang harus berdasarkan hukum, kekuasaan dan kewenangan.

Imre Anthoni Csabafi berpendapat bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik mencakup hak dari suatu negara mengatur dan mempengaruhi hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa melalui langkah atau tindakan legislatif, eksekutif, atau yudikatif yang tidak semata-mata merupakan permasalahan dalam negeri (Sefriani, 2010, hal. 220).

Menurut John O’Brien, ada tiga jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh negara berdaulat, yaitu:

1. Kewenangan negara untuk membuat Undang-Undang terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*Legislative Jurisdiction or Prospective Jurisdiction*);
2. Kewenangan negara untuk menegakkan ketentuan hukum nasionalnya (*Executive Jurisdiction or Enforcement Jurisdiction*);
3. Kewenangan pengadilan Negeri untuk mengadili dan mengambil Keputusan Peradilan (*Judicial Jurisdiction*).

Dari teori Yurisdiksi dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan suatu badan peradilan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, yurisdiksi dikaitkan dengan Negara maka Pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja khususnya Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal asing.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya. Pemberian kekuasaan ini dapat diukur, dalam arti luas dan kedalamannya dapat ditentukan. Menurut Satjipto Rahardjo, kekuasaan semacam ini disebut “hak”. Jadi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu disebut hak, tetapi hanya tertentu saja, yaitu yang diberikan kepada seseorang oleh hukum atau Undang-Undang. Suatu kepentingan tunduk pada suatu hak karena dilindungi oleh Undang-Undang dan juga adanya pengakuan (Rahardjo, 2014, hal. 53).

Menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), ia mendefinisikan hukum sebagai aturan hidup yang imperative untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. (Soeroso, 2020, hal. 20)

Menurut W. Lavensbergen, hukum pada dasarnya adalah peraturan yang terbatas pada perbuatan manusia. Menurutnya, hukum merupakan “*norma agendi*” yaitu norma yang bertindak atau mengatur tindakan manusia. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa W. Lavenbergen berpendapat bahwa objek hukum adalah perbuatan manusia dalam masyarakat (Soeroso, 2020, hal. 30).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari

hal-hal yang merugikan, sesuatu yang dapat berupa kepentingan atau benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Misalnya, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan melalui penggunaan lembaga dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan ketentraman.

Dapat di Tarik kesimpulan dari teori perlindungan hukum bahwa anak buah kapal yang bekerja di kapal asing berhak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya hukum harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar anak buah kapal mendapatkan hak-hak pada saat bekerja di kapal asing atau luar negeri.

Anak buah kapal adalah anak kapal selain Nakhoda. Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Nakhoda merupakan salah seorang berasal dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi pada kapal dan mempunyai

wewenang dan tanggung jawab eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Awak Kapal maksudnya orang yang bekerja ataupun di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik ataupun operator kapal guna melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia awak kapal memiliki arti anak buah kapal (perahu) (Arti Awak Kapal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)).

Pengertian anak buah kapal terdapat dalam Pasal 1 angka (40) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Anak buah kapal atau sering juga di sebut awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”.

Penafsiran awak kapal bagi syarat Pasal 1 Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, ialah: “Awak kapal berarti tiap orang yang dipekerjakan ataupun bekerja dalam kapasitas apapun ataupun melakukan pekerjaan di kapal penangkap ikan, tercantum mereka yang bekerja di kapal serta dibayar bersumber pada pembagian hasil tangkapan tetapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang- orang lain dengan layanan senantiasa Pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melakukan tugas di kapal penangkap ikan serta pengamat awak kapal”.

Awak kapal terbagi menjadi beberapa bagian, para kepala bagian bertanggung jawab atas anak buah kapal sesuai dengan bagiannya. *Chief Officer* (Mualim I) adalah komandan bagian geladak, *Chief Engineer* bertanggung jawab langsung kepada nakhoda untuk bagian geladak. *Chief Engineer* (Kepala Kamar Mesin) adalah komandan bagian mesin, *Chief Engineer* bertanggung jawab langsung kepada nakhoda untuk bagian mesin kapal. *Chief Steward* (Kepala Bagian Perbekalan) adalah komandan bagian dapur kapal, *Chief Steward* bertanggung jawab langsung kepada nakhoda untuk bagian dapur kapal. Nakhoda, sebagai pemimpin perjalanan, memiliki tanggung jawab utama baik untuk geladak, mesin maupun dapur kapal secara keseluruhan.

c. Konvensi Perlindungan Pekerja Imigran

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) adalah “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah “Orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun illegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu”.

Permasalahan di Indonesia, UU Nomor 39 Tahun 2004 sebagai peraturan tertinggi dalam menangani masalah buruh migran tidak memasukkan definisi mengenai buruh migran yang tidak berdokumen. Selain itu, terjadinya krisis ekonomi mendorong negara penerima meningkatkan kebutuhan buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen (agar tidak punya hak untuk melakukan apapun dan untuk mendapatkan tenaga buruh murah).

Di negara pengirim seperti Indonesia, memilih menjadi buruh migran tidak berdokumen karena keterpaksaan agar tidak dibebani pungutan biaya yang mahal dari proses pemberangkatan ketika menjadi buruh migran. (Hidayanti N., 2013, hal. 209)

Indonesia sampai saat ini telah meratifikasi 9 (sembilan) Konvensi dasar ILO dari berbagai standar ketenagakerjaan Internasional dengan mensahkannya melalui undang-undang serta peraturan dibawah undang-undang konvensi dasar ILO yang telah diratifikasi negara Indonesia dan berhubungan dengan kasus yang saya teliti adalah :

- Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*), diratifikasi dengan Stbl. Nomor 26, 1933.

- Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*The Abolition of Forced Labour*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999.
- Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*), diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999.

UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 34 menyebutkan Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri diatur melalui Undang-undang. Pemanfaatan dan pengaturan pasar kerja luar negeri diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO. Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf b butir IV Pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu Negara ke negara yang lain yang mungkin telah disetujui oleh Pemerintah Negara penerima Tenaga Kerja Indonesia. kebijakan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P3TKI-LN) harus bersifat menyeluruh dengan melibatkan seluruh Instansi Pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun pelayanan kepada Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta berikut lembaga lain yang mendukungnya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dapat dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi deskriptif analitis digunakan penulis pada penulisan penelitian ini. Deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang memaparkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan secara menyeluruh tentang objek penelitian untuk dikaitkan dengan teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. Sehingga dalam spesifikasi penelitian yang digunakan dengan sifat deskriptif analitis ini memaparkan gambaran yang tepat tentang bagaimana tanggung jawab Pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak buah kapal yang mengalami ketidakadilan pada saat sedang bekerja menurut Hukum Internasional.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis saat menulis penelitian ini. Menurut Ronny Hanitijo: “Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian di bidang hukum. Penelitian ini mengkonseptualisasikan asas, norma, dogma atau kaidah hukum. Asas, norma, dogma, atau kaidah hukum inilah yang menjadi tolak ukur perilaku dalam penelitian ini. Ketentuan dilakukan dengan tetap menjadi terdepan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan mempelajari implementasinya di lapangan.” (Hanitijo, 1990, hal. 5).

Metode penelitian yuridis normatif menitikberatkan bahwa dalam penelitian ini data-data yang tercantum mengacu pada data sekunder di bidang hukum dan juga data-data di luar hukum. Lalu metode ini pula memusatkan kepada data kepustakaan yang didapatkan melalui pencarian materi dari buku, artikel, literatur serta situs internet yang berkesinambungan dengan aturan hukum yang berlaku dan secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi anak buah kapal. Bahan-bahan materi tersebut diakumulasikan sebagai data yang telah dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang akan menjadi bahan kepustakaan atau data sekunder serta bahan hukum primer atau bahan hukum yang utama.

B. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah:

a. Penilitian Kepustakaan

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini atau dari pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian ini.

Menurut literatur penelitian Soerjono Soekanto, “Penelitian pada data sekunder, secara teratur dan sistematis mengatur pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka, yang akan dituangkan ke dalam bentuk layanan pendidikan, informatif dan menghibur bagi masyarakat”

(Mamudji & Soekanto, 1985, hal. 11). Penelitian Kepustakaan ini penulis memusatkan guna memperoleh data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV;
 - (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 - (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
 - (5) Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 - (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;
 - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 Tentang Kepelautan;
 - (8) Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2007 tentang *Work in Fishing*;

(9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);

(10) Peraturan Kepala BNP2TKIPER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing;

- 2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang berikan penjelasan terpaut bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari kumpulan hasil penelitian para ahli dibidang ilmu hukum, terkhusus hukum ketatanegaraan, hasil pembelajaran pada perkuliahan, karya ilmiah yang memuat jurnal tentang hukum, bacaan dari media cetak ataupun internet yang isinya berkaitan dengan rumusan masalah yang nantinya akan di bahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang berikan petunjuk maupun uraian pada hukum primer serta sekunder, semacam kamus hukum, internet dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang isi data tangan pertama bersifat mengikat dan mengikat secara hukum, serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lain yang berwenang. Secara sederhana bahan

hukum yang utama adalah peraturan-peraturan yang ada terkait dengan materi pelajaran, bentuk hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.188 tahun 2007 tentang *Work in Fishing*;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekruitn dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
- Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

b. Data Sekunder

Akses terhadap informasi sekunder adalah melalui penelitian

kepuustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca dokumen-dokumen dan karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian catat bagian yang memuat isi penelitian.

D. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kepustakaan yang berupa naskah yang belum dianalisis dengan menggunakan catatan dan alat tulis lainnya. Data Kepustakaan ini yang digunakan untuk memperoleh data secara tertulis dengan memerlukan laptop sebagai alat elektronik untuk mendapatkan data dari alamat website internet serta flashdisk untuk menyimpan data tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif. Metode ini dilakukan sebagai salah satu cara penelitian agar mendapatkan data deskriptif analitis dengan cara menyusun secara sistematis, analisis data yang didapatkan menitikberatkan pada tinjauan normative terhadap arah atau tujuan penelitian serta peraturan lain sebagai hukum positif. Dalam hal tersebut penulis akan meneliti dengan ketentuan perundang-undangan dengan mencermati hierarki perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya. Yang mana dinyatakan jika Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan serta jika Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi bisa menyampingkan Undang-Undang yang terletak dibawahnya.

F. Lokasi Penelitian

Peneliti mengumpulkan bahan penelitian dengan menggunakan penelitan kepustakaan. Lokasi penelitian pertama adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung dan lokasi penelitian kedua adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Raya Bandung, Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.